

BPR Bank Salatiga Kumpulkan Uang Cadangan

SALATIGA (KR) - Perusahaan Umum Daerah (Perumda) BPR Bank Salatiga mengumpulkan uang untuk dana cadangan pembayaran ke nasabah yang dirugikan atas kasus korupsi dan TPPU di Bank Salatiga. Direktur Utama Perumda BPR Bank Salatiga Darto Supriyadi, mengatakan sampai awal Januari 2022, dana cadangan sudah terkumpul Rp 3,1 miliar. "Kami mengumpulkan dana (uang) cadangan untuk membayar kerugian yang diderita para nasabah akibat kasus korupsi dan TPPU di Bank Salatiga yang kini masih proses hukum," jelas Darto Supriyadi, Kamis (27/1). Pengumpulan dana cadangan ini sudah dilakukan beberapa tahun ini dan untuk mengantisipasi jika sudah ada putusan hukum tetap (inkracht) atas kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang para terdakwa.

"Uang cadangan yang kini sudah terkumpul Rp 3,1 miliar di Bank Salatiga dibayarkan kepada para nasabah yang menjadi korban setelah putusan hukum tetap. Tentu manajemen Bank Salatiga juga siap-siap, ini bentuk tanggung jawab manajemen, i tandasnya. Manajemen Bank Salatiga berharap putusan hakim pengadilan tipikor juga menyita aset para terdakwa dan dikembalikan ke Bank Salatiga. Sehingga ketika bisa membayar kerugian nasabah, dengan tidak terlalu berat karena terbantu dari aset para terdakwa. Ditanya mengenai jumlah uang yang harus dikembalikan kepada nasabah, ia mengungkapkan tercatat kurang lebih Rp 18,5 miliar. Diketahui kasus korupsi di Bank Salatiga milik Pemkot Salatiga merugikan keuangan nasabah kurang lebih Rp 24,7 miliar. Kini masih dalam proses hukum dan ditangani Kejati Jateng. (Sus)

Aliran Sungai Deras Talut dan Jalan Roboh

MAGELANG (KR) - Talut pengaman aliran sungai dan jalan sepanjang 50 meter di Kampung Nambangan Kelurahan Rejowinangun Utara Kota Magelang, roboh. Ruas jalan, yang merupakan akses penghubung warga, juga terganggu. Banyak pihak, baik masyarakat, relawan beberapa komunitas, tim BPBD Kota Magelang, TNI dan Polri melakukan kerja bakti di lokasi, Jumat (28/1), diantaranya untuk melakukan pembersihan material longsor dan pembenahan. Plt Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Kota Magelang Machbub Yani Arfian kepada KR di lokasi kejadian mengatakan hujan lebat menggyuyur wilayah Kota Magelang, termasuk di Kampung Nambangan, Kamis (27/1) sore. Derasnya aliran sungai diduga juga membawa dampak terhadap ambrol dan robohnya bangunan talut sungai. Informasi yang diperoleh KR di lokasi, Jumat, menyebutkan tidak sedikit ikan Pelus atau Ikan Sidat yang membuat sarang di lokasi tersebut dengan membuat lubang-lubang yang cukup dalam. Hal ini diduga juga berpengaruh pada keberadaan bangunan talut.

Karena bangunan talut yang menjadi penopang jalan roboh, kondisi jalan ikut ambles dan roboh menutup sebagian aliran sungai. Material talut pengaman sungai dan bongkahan material jalan menutup sebagian aliran sungai. Dampak lain, tanah pekarangan milik warga yang ada di tepi aliran sungai, panjang 20 meter dan tinggi 2 meter, juga ikut longsor dan menutup akses jalan di dekatnya. Sementara itu dari Kebun Raya Gunung Tidar Kota Magelang diperoleh informasi adanya tembok pagar yang roboh. Hal ini dibenarkan Kepala UPT Kebun Raya Gunung Tidar Kota Magelang Yhan Noerchayho Wibowo SP saat ditemui KR di lokasi, Jumat. Dikatakan, Kamis sore lalu hujan deras menggyuyur. Saat itu lubang-lubang sulingan air di tembok pagar berfungsi sempurna, air dapat mengalir normal. Bersamaan dengan turunnya hujan deras tersebut, mendadak tembok pagar sisi utara sebelah barat ini roboh. (Tha)



KR-Thoha

Bangunan pagar sisi utara kawasan Kebun Raya Gunung Tidar yang ambrol.

JNE Turut Pulihkan Perekonomian Pelaku Usaha UMKM

SEMARANG (KR) - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, menyebut perempuan memiliki peranan penting dalam upaya membangkitkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Sebanyak 65 juta UMKM memberikan kontribusi sebesar 61 persen perekonomian nasional, dan 64 persen pelaku UMKM di Indonesia adalah perempuan.

"Bangkitnya perekonomian nasional adalah bangkitnya UMKM, serta bangkitnya perempuan Indonesia yang berdaya khususnya pada bidang ekonomi sebagai pelaku usaha UMKM, yang memiliki peranan sangat penting bagi ketahanan ekonomi keluarga juga bagi negara," kata Sandiaga Uno, Kamis (27/1) di Semarang. Saat ini pariwisata sudah bertransformasi menjadi lebih berkualitas, juga telah menciptakan enam kali lipat lapangan pekerjaan dibandingkan industri lainnya.

Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif ini akan betul-betul membuka peluang ekonomi di masyarakat. Khususnya di perkotaan dengan konsep baru yaitu wisata berbasis heritage. "Kuncinya adalah inovasi adaptasi dan kolaborasi. Inovasi dengan big data. Adaptasi sesuai dengan protokol kesehatan dan terakhir kolaborasi tidak hanya sektoral tapi semuanya," ungkapnya.

Sebagai contoh, di masa pandemi Covid-19, kondisi ekonomi Desa Pakumbulan justru bergeliat kembali. Momentum pandemi Covid-19, yang mendorong migrasi online di segala bidang, ternyata membuka peluang yang dapat ditangkap dengan baik oleh warga desa untuk mengembangkan bisnis pakaian yang dijual secara online. Setelah mengamati perkembangan tren, harus melebarkan sayap untuk menjajal produk-produk baru dan mencoba platform online lain seperti marketplace. (Ati)



KR-Sukmawan

JALAN
Guyangan-Petanahan
yang menghubungkan
jalan utama
Purwokerto-Yogyakarta
dengan Jalur Jalan
Lintas Selatan (JJLS)
dipenuhi lubang
dengan aspal
mengelupas, utamanya
di Desa Karanggedang,
Kecamatan Sruweng,
Kabupaten Kebumen.
Tampak pengendara
mobil mencoba
menghindari lubang
yang cukup dalam yang
tertutup genangan air,
Senin (24/1).

Prof Gunarto SH MHum Rektor Baru Unissula

SEMARANG (KR) - Prof Dr Gunarto SH MHum akan dilantik menjadi Rektor Unissula Semarang periode 2022-2027 di kampus Kaligawe Semarang, Senin (31/1). Prof Gunarto akan menggantikan Rektor Unissula sebelumnya, Drs Bedjo Santoso MT PhD.

Prof Gunarto merupakan sosok berpengalaman dan pernah mengemban berbagai amanah penting di Unissula antara lain Wakil Rektor II, Ketua Program Doktor Ilmu Hukum, Dekan Fakultas Hukum, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum.

Kiprah pria kelahiran Tegal 5 Maret 1963 tersebut juga memiliki banyak pengalaman manajemen institusi di luar kampus yang sangat baik antara lain menjadi staf ahli Jaksa Agung 2014-2017, Ketua Pengawas Pemilu Kota Semarang 2003-2007, Ketua tim pemeriksa da-

erah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Daerah Jateng 2003-2007 dan berbagai jabatan penting lainnya. Ia juga merupakan asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) 2021-Sekarang. Dirinya bertekad mentransformasikan dan mengaselerasikan Unissula menjadi universitas unggul dan diakui di ASEAN. Pertama akselerasi ketaqwaan, Birru Al-Walidaini, profesionalisme dan keberkahan.

Hal itu dilakukan dengan meningkatkan boarding school untuk mem-

bentuk ketaqwaan, birru al-walidaini, penguasaan Alquran, fiqih, penguasaan bahasa Arab, bahasa Inggris. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Budaya Akademik Islami. Rekonstruksi ilmu pengetahuan berbasis nilai ajaran Islam. Pendirian pusat studi Alquran serta penguatan kampus hijau yang Islami.

Kedua, akselerasi institusi kelembagaan dan sumber daya manusia. Dilakukan dengan memperoleh akreditasi unggul perguruan tinggi tahun 2022. Semua prodi terakreditasi A atau unggul



KR-Isimewa

Prof Dr Gunarto SH MHum

pada tahun 2027. Peningkatan jumlah Guru Besar menjadi 50 Guru Besar pada tahun 2027. Meningkatkan jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Lektor, Lektor Kepala

dan Guru Besar sebanyak lebih dari 70% dari jumlah dosen.

Ketiga, akselerasi pembelajaran berbasis ajaran Islam, revolusi industri 4.0 dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan perluasan TI. Melalui peningkatan mutu pembelajaran berbasis nilai-nilai ajaran Islam, meningkatkan pengajaran melalui daring dan hybrid. Keempat, akselerasi penelitian, inovasi dan publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi. Kelima, akselerasi internasionalisasi Unissula di level ASEAN melalui peningkatan kelas internasional. Juga peningkatan kualitas dosen untuk supporting program internasionalisasi. (Sgi)

Diskominfo Klaten Terapkan Tanda Tangan Elektronik

KLATEN (KR) - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Klaten menerapkan tanda tangan elektronik (TTE). Program ini merupakan bagian digitalisasi sistem layanan, menuju Klaten Go Digital.

Kepala Diskominfo Klaten, Amin Musthofa kepada KR, Jumat (28/01/2022) mengemukakan, sebagai langkah awal, telah dilakukan sosialisasi penggunaan TTE kepada 26 kecamatan di Kabupaten Klaten di Gedung Diskominfo Klaten. Program Go Digital digunakan untuk menandatangani dokumen di lingkup pemerintah kecamatan, seperti surat menyurat dan dokumen lainnya yang bersifat risiko rendah.

"Untuk tahap awal, kami sasar untuk kecamatan dan dokumen yang dibubuhi TTE merupakan dokumen yang bersifat risiko rendah," kata Amin Musthofa. Menurut Amin Musthofa, dengan penerapan TTE, penandatanganan surat menyurat dan dokumen-dokumen kini tidak lagi harus menunggu pejabat terkait berada di tempat (kantor), melainkan dapat dilakukan di mana dan kapan saja. Dengan demikian, diharapkan administrasi hingga layanan publik dapat berjalan lebih cepat.

"Selama ada akses internet, TTE dapat dilakukan, jadi sangat praktis, cepat, dan efisien. Harapannya ke depan semua layanan publik yang ada di Pemkab Klaten sudah dilengkapi dengan TTE," jelas Amin Musthofa. Selain menjamin keaslian

dan efisiensi, penggunaan TTE juga dapat menghemat penggunaan kertas dalam jumlah banyak. Sebelumnya, untuk surat menyurat dapat mencapai ratusan lembar kertas. Namun, nantinya dapat diminimalisasi dengan berlakunya TTE.

Amin Musthofa menjelaskan secara teknis penerapan TTE dilakukan melalui BSrE atau Balai Sertifikat Elektronik. Yakni Penyelenggara Sertifikat Elektronik/Certification Authority (CA) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BSrE dibentuk dan dijalankan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 yang menganut sistem satu induk dan diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Sertifikat elektronik merupakan sertifikat yang bersifat elektronik yang membuat tanda tangan digital dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik, yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik.

Langkah itu merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Juga merupakan amanah Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pasal 40 mengamanahkan penjaminan keamanan SPBE dalam layanan publik salah satu bentuknya berupa sertifikat elektronik. (Sit)

Aset Pemprov Jateng di DKI Perlu Dievaluasi

SEMARANG (KR) - Anggota Komisi C DPRD Jateng Agung Budi Margono minta kepada Pemprov Jateng melakukan evaluasi terhadap pengelolaan aset yang dikelola Badan Penghubung (Banhub) Provinsi Jateng di DKI Jakarta. Hal tersebut berkaitan dengan kurang optimalnya pengelolaan aset yang menyebabkan tidak tercapainya target pendapatan dari sektor tersebut pada tahun 2021 lalu.

Agung Budi Margono mengatakan hal tersebut kepada wartawan di Semarang, Jumat (28/1). Tidak hanya evaluasi terhadap aset, tetapi Agung minta juga dilakukan evaluasi terhadap kelembagaan. Ini harus dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset Pemprov Jateng yang ada di DKI Jakarta. "Harus ada evaluasi kelembagaan dan aset, dan ini perlu dilakukan riset agar dapat diketahui aset mana yang perlu dipertahankan dan aset apa saja yang bisa dilepas. Secara kelembagaan Banhub perlu melakukan analisis dan inovasi agar aset yang dikelola dapat optimal, terutama dalam penyusunan anggaran perlu analisis mendalam, jangan bersifat rutin belaka," tutur Agung.

Kepala Banhub Provinsi Jateng Bernadeta Emy DM melaporkan kepada Komisi C DPRD Jateng, instansi yang dipimpinnya hanya dapat menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 336,59 juta dari target perubahan 2021 sebesar Rp 500 juta atau hanya 67,32%. Realisasi pendapatan itu berasal dari Retribusi tempat penginapan (Wisma Provinsi Jateng di Jalan Darmawangsa, Jalan Prapanca, Jalan Samarinda, dan Wisma Anjungan Jateng TMII) dan Retribusi Kekayaan Daerah. Selain itu menurut Emy, tidak tercapainya target PDA 2021 tersebut karena saat itu Jakarta sedang dalam upaya menekan penyebaran Covid-19 dan merebaknya varian Omicron serta adanya dinamika di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang sedang melakukan persiapan rangkaian G-20. (Bdi)

Jateng Butuh Pendekatan Baru Pembangunan Ekonomi

SEMARANG (KR) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dapil Jateng Dr Abdul Kholik menegaskan dalam upaya menciptakan keseimbangan dan pemerataan pembangunan di Jateng, dibutuhkan tiga poros ekonomi sebagai pusat pertumbuhan, yakni kawasan Jateng Utara, Jateng Selatan, dan Jateng Timur.

Pendekatan tiga wilayah ini sangat penting, mengingat hingga kini, pembangunan ekonomi di Jateng masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti besarnya beban populasi, ketidakseimbangan antarkawasan, keterbatasan produk unggulan yang berdimensi jangka panjang hingga tingkat kemiskinan termasuk pengangguran yang masih cukup tinggi.

Penegasan tersebut disampaikan dalam forum diskusi terbatas (FGD) yang digelar di Kantor DPD RI Jawa Tengah, Jalan Imam Bonjol, Semarang, Kamis (27/1).

FGD membahas berbagai temuan DPD RI tentang pengawasan pembangunan yang bertumpu pada pelaksanaan dan hasil capaian pembangunan ekonomi. FGD dihadiri para narasumber dan pembahas, terdiri para ekonom yang mewakili tiga kawasan yaitu, Lukman Hakim SE MSi PhD dari UNS Surakarta, Dr Rahab SE MSc dari Unsoed Purwokerto, Firmansyah SE MSi PhD dari UNDP Semarang, dan Direktur Riset INDEF/Dosen FEB UI, Berly Martawardaya SE MSc, serta para wartawan.

Di era pandemi, lanjut Kholik, tantangan tersebut

terasa semakin berat, akibat terjadi pembatasan sosial hingga mengakibatkan mobilitas dan produktivitas masyarakat menurun. Abdul Kholik memaparkan, di era pandemi pertumbuhan ekonomi Jateng mengalami kontraksi tajam pada angka minus 5,91 persen di kuartal II 2020. Kemudian perlahan bergerak ke arah pemulihan hingga menampak kembali. Tercatat hingga kuartal ke III 2021, pertumbuhan ekonomi Jateng pada trend positif di kisaran 2,56 persen.

Pengalaman pandemi, tambahnya selain sebagai ujian untuk ketahanan per-ekonomi, juga sebagai kesempatan mengkaji secara komprehensif atas capaian dan problematika yang dihadapi. "Muaranya dapat menjadi bahan refleksi se-

kaligus proyeksi ke depan untuk membangun optimisme ekonomi," tegasnya.

Dalam rangka mengatasi kesenjangan antarkawasan tersebut, perlu diseimbangkan poros ekonomi sebagai pusat pertumbuhan. Selama ini hanya berada di Semarang sebagai representasi kawasan Jateng Utara. Ke-

depan perlu dibuat dua kawasan lagi yakni poros ekonomi Jateng Selatan berpusat di Purwokerto, dan kawasan Jateng Timur di Soloraya. Berbasis tiga poros ekonomi ini, tegasnya, diharapkan provinsi ini bakal lebih seimbang dengan penekanan masing-masing potensi kawasan. (Isi)

Agenda Tahun 2022: Pendekatan Baru Membangun Ekonomi



KR-Isdiyanto

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dapil Jateng Dr Abdul Kholik (depan kanan), saat memimpin FGD.